

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama yang dilakukan setiap negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yang harus dihadapi salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu menjadi pembicaraan khusus diberbagai negara berkembang salah satunya di Indonesia. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang kesehatan dan pendidikan secara layak. Kondisi ini tidak hanya menggambarkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketimpangan hasil pembangunan yang belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Todaro kemiskinan yang luas akan menciptakan dimana kaum miskin tidak bisa mendapatkan pinjaman, tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Rendahnya pendapatan dan rendahnya standar hidup orang-orang miskin yang berakibat pada buruknya kesehatan, nutrisi, dan pendidikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi mereka, sehingga secara langsung dan tidak langsung menimbulkan perekonomian yang tumbuh lambat. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup orang-orang miskin tidak hanya akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan materi mereka tetapi juga terhadap produktivitas dan pendapatan perekonomian secara keseluruhan (Muhariah et al., 2021).

Permasalahan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor ekonomi makro yang mempengaruhinya. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kemiskinan erat kaitannya dengan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran yang merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh (Todaro, M. P., & Smith, 2020), yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya ditandai oleh peningkatan output secara agregat, tetapi juga oleh pemerataan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, dan stabilitas harga yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Namun, dalam kenyataannya permasalahan kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan yang hingga kini masih menghadapi tantangan dalam menekan angka kemiskinan. Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang belum merata, laju inflasi yang berfluktuasi, serta tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan mempertimbangkan faktor ekonomi yang mempengaruhinya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang pesat secara otomatis tidak berdampak terhadap menurunnya tingkat kemiskinan suatu negara. Namun, dengan adanya

pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka sebuah negara dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa semakin meningkatnya produksi negara tersebut, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dapat mengurangi kemiskinan di suatu negara (Hastin & Siswadhi, 2021).

Selain pertumbuhan ekonomi, Inflasi juga berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan dan berlangsung terus-menerus, inflasi juga mencerminkan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan pada barang lainnya.

Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan (Ningsih et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena pendapatan yang diterima tidak mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok. Masyarakat berpendapatan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak karena sebagian besar penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika harga harga terus naik,

kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin berkurang sehingga berisiko menambah jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian harga dan stabilitas ekonomi makro menjadi bagian dalam strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

Sementara itu pengangguran menjadi masalah yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Pengangguran dapat diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia tertentu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan agar memperoleh upah atau keuntungan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada (Sukirno, 2004:372).

Saat ini pengangguran bukan hanya menjadi masalah ekonomi, melainkan juga menjadi masalah sosial dan politik. Dampak sosial dari pengangguran yang tinggi yaitu meningkatkan tingkat kriminalitas, baik perampokan, pencurian, serta perdagangan ilegal, hal ini dapat terjadi karena tuntutan hidup atau tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengangguran juga terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan serta banyak orang yang sulit dalam mencari pekerjaan (Fitri Ani Dwi Lusiana et al., 2024). Dalam konteks pembangunan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator penting untuk keberhasilan suatu pembangunan. Semakin banyak masyarakat yang bekerja, semakin besar pula kontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam mengurangi kemiskinan dan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dengan potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi di daerah ini menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, penurunan tingkat kemiskinan belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat salah satu penyebabnya kemungkinan karena belum optimalnya pengelolaan faktor-faktor pembangunan ekonomi seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan lapangan kerja serta kestabilan harga barang kebutuhan pokok.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan**  
**di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Pengangguran (%)	Kemiskinan (%)
2019	3,58	2,06	4,53	12,71
2020	-0,11	1,55	5,51	12,66
2021	3,58	1,82	4,98	12,84
2022	5,24	5,94	4,63	11,90
2023	5,08	3,17	4,11	11,78
2024	5,03	1,20	3,86	10,97

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, selama periode 2019-2024 kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan yang cukup berarti dan mencerminkan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, di Sumatera Selatan mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0,11 persen akibat pandemi yang melemahkan sebagian besar aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, sejak 2022 hingga 2024 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat hingga berada pada

kisaran 5 persen. Secara teoritis, berdasarkan pendekatan pertumbuhan ekonomi Neoklasik dan konsep pertumbuhan inklusif, peningkatan PDRB seharusnya dapat menurunkan kemiskinan melalui bertambahnya pendapatan dan kesempatan kerja. Namun, data menunjukkan bahwa kemiskinan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat cukup cepat penurunan kemiskinan tidak terjadi secara drastis. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok berpendapatan rendah, sehingga efeknya terhadap penurunan kemiskinan masih terbatas.

Dari sisi inflasi, Sumatera Selatan mengalami pergerakan yang relatif stabil pada tahun 2019-2021, namun inflasi melonjak tajam pada 2022 hingga mencapai 5,94 persen sebelum kembali memnurun pada tahun 2023-2024. Menurut teori Keynes mengenai innflasi dan daya beli, kenaikan harga terutama pada komoditas pangan berdampak lebih besar terhadap kelompok miskin karena sebagian besar pendapatannya dialokasikakn untuk kebutuhan konsumsi dasar. Kondisi inflasi yang tinggi pada tahun 2022 berpotensi memperlambat penurunan kemiskinan karena mendorong meningkatnya garis kemiskinan dan menekan kemampuan rumah tangga untuk memnuhi kebutuhan pokok. Dengan kata lain, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, inflasi yang tinggu dapat menghambat kemampuan masyarakat miskin untuk merasakan manfaat pertumbuhan tersebut.

Sementara itu tingkat pengangguran juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemikiskinan. Tingkat pengangguran terbuka sempat meningkat pada tahun 2020 hingga 5,51 persen akibat terhentinya banyak aktivitas usaha,, namun terus menurun hingga mencapai 3,86 persen pada 2024. Peningkatan

pengangguran mencerminkan berkurangnya output dan pendapatan masyarakat yang kembali bekerja,, meskipun sebagian besar pekerjaan bersifat informal dan berpendapatan rendah. hal ini menjelaskan mengapa penurunan pengangguran berkontribusi terhadap turunnya angka kemiskinan, tetapi dampaknya tidak terlalu drastis karena kualitas pekerjaan yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebelumnya tentang apakah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), Inflasi ( $X_2$ ) Dan Pengangguran ( $X_3$ ) Terhadap Tingkat Kemiskinan ( $Y$ ) di Sumatera Selatan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan baik secara parsial maupun secara simultan di Sumatera Selatan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian empiris mengenai hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang ekonomi pembangunan. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan pengurangan tingkat pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan.